BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 antara lain melibatkan beberapa faktor, seperti belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, terdapat perubahan mendasar pada Pasal 157 melalui tiga kali perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan tersebut juga mempertimbangkan sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, absennya perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada)
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang bersifat *declaratory constitutive* yaitu Pertama, menghapus peran Badan Peradilan Khusus sebagai Lembaga Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada. Kedua, Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengamankan penyelesaian PHPU Pilkada bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, banyaknya perkara pemilu dan pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencantumkan secara spesifik mengenai kewenangan untuk memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan kepastian hukum.
2. Kepada pembentuk undang-undang agar dapat merumuskan *ius constituendum* pengaturan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan banyaknya beban kerja Mahkamah Konstitusi sehingga dapat berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi putusan yang dihasilkan.